




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN PERSIDANGAN DAN  
PERUNDANG – UNDANGAN

Nomor SOP	:	500.12.6.5/43/Setwan/2025
Tanggal Pembuatan	:	27 November 2025
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	01 Desember 2025
Disahkan Oleh	:	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PURWAKARTA  RUDI HARTONO, S.AP., M.M Pembina Tk. I, IV b 19701023-199203 1 007
Judul SOP	:	SOP PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

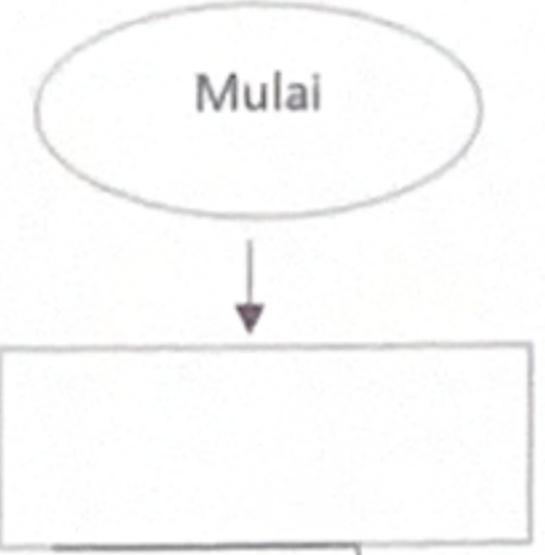
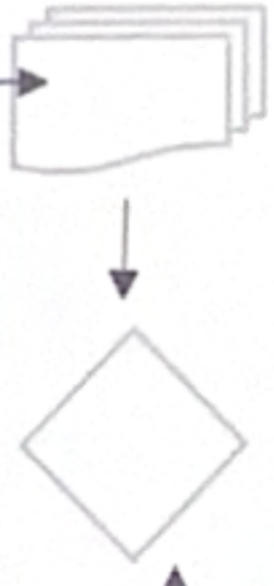


**Dasar Hukum:**

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

**Kualifikasi Pelaksanaan:**

- Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
- Menguasai pengolahan aplikasi berbasis web
- Menguasai aplikasi komputer penunjang perkantoran
- Mengetahui peraturan perundang – undangan termasuk produk hukum daerah

<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</li> <li>8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum</li> <li>9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta</li> </ol>	
<p><b>Keterkaitan:</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Peraturan Perundang – Undangan</li> <li>- Dokumen Produk Hukum Daerah</li> <li>- Perlengkapan kantor dan alat tulis kantor</li> <li>- Jaringan Internet</li> </ul>

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		Bidang Koleksi Hukum dan Teknis Pengelolaan Dokumen Hukum	Koordinator	Bidang Promosi JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Penerimaan Dokumen				<ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumen produk hukum dan perundang – undangan.</li> <li>- dokumen terkait JDIH lainnya</li> </ul>	30'	Tersedianya dokumen hukum dan perundang – undangan serta dokumen terkait JDIH lainnya.	
2.	Mengidentifikasi dan memeriksa dokumen sesuai jenisnya				<ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumen produk hukum dan perundang – undangan.</li> <li>- dokumen terkait JDIH lainnya.</li> </ul>	60"	Tertatanya dokumen hukum dan perundang – undangan serta dokumen terkait JDIH lainnya.	
3.	Mengolah dokumen untuk diinput ke dalam database JDIH					60"	Dokumen yang siap diinput.	
4.	Upload dokumen ke website JDIH					60"	Publikasi dokumen hukum dan perundang – undangan serta	

							dokumen terkait JDIH lainnya.	
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--